



Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SD Negeri 01 Labuah Gunuang
Nahdatul Hazmi¹, Neviyarni Suhaili², Mudjiran³, Herman Nirwana⁴
STKIP Yayasan Abdi Pendidikan,¹Universitas Negeri Padang²³⁴
email: hazminahdatul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri 01 Labuah Gunuang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling memiliki peran signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui berbagai strategi dan teknik bimbingan. Guru bimbingan dan konseling memberikan dukungan emosional, penguatan positif, dan pengembangan keterampilan belajar yang efektif. Selain itu, guru juga mengidentifikasi dan mengatasi hambatan belajar yang dihadapi siswa, sehingga membantu mereka mencapai potensi maksimalnya. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran guru bimbingan dan konseling dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Implementasi program bimbingan dan konseling yang efektif di sekolah dasar sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Kata Kunci : Motivasi belajar, guru Bimbingan dan Konseling, motivasi siswa

Abstrac

This study aims to examine the role of guidance and counseling teachers in increasing student learning motivation at SD Negeri 01 Labuah Gunuang. The research method used is a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that guidance and counseling teachers have a significant role in increasing student learning motivation through various guidance strategies and techniques. Tutoring and counseling teachers provide emotional support, positive reinforcement, and effective study skill development. In addition, teachers also identify and address learning barriers faced by students, thus helping them reach their maximum potential. The findings of this study underscore the importance of the role of guidance and counseling teachers in creating a conducive learning environment and motivating students to learn better. The implementation of effective guidance and counseling programs in elementary schools is urgently needed to improve student motivation and learning outcomes.

Keywords: Learning motivation, Guidance and Counseling teachers, student motivation

Pendahuluan

Dalam kehidupan politik seringkali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral, yaitu tindakan politik yang semata-mata untuk merebut dan memperoleh kekuasaan karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya seseorang atau kelompok akan memperoleh keuntungan materi, popularitas, dan fasilitas yang membuat hidupnya serba berkecukupan dan memperoleh status social yang tinggi. Dalam format politik yang demikian dapat dipastikan, siapapun akan mengorbankan apa saja dan dengan cara bagaimanapun berusaha untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan kata lain, kekuasaan adalah segala-galanya sehingga harus diperjuangkan dengan mati-matian.

Dalam politik moral, kekuasaan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita moral kemanusiaan. Kekuasaan yang hendak dicapainya tidak diperoleh dengan menghalalkan segala cara, tetapi dicapai melalui cara-cara yang bijak, sah, dan sehat secara prosedural, dibenarkan secara moralitas kemanusiaan, dan kepatutan sosial. Politik moral ini seharusnya menjadi tujuan yang harus dicapai oleh politisi sejati, dengan harapan jalannya pemerintahan dan negara akan lebih sehat, kuat, terkontrol, dan berlangsung untuk kepentingan memajukan kehidupan rakyat yang lebih baik secara jasmani, rohani, dan intelektual. Untuk itu perlu keteladanan politik.

Kita sangat berhasrat memiliki pemimpin dengan sebuah visi besar tentang masa depan bangsa ini. Namun, kita lebih membutuhkan pemimpin yang mampu memberi teladan. Rakyat yang terus menerus dihantam pemiskinan struktural sejak krisis yang di mulai tahun 1997, tentu tak semuanya paham dengan narasi visi absurd seorang pemimpin tentang kemana arah kapal bangsa ini hendak dibawa berlayar. Tetapi hati mereka sangat mudah merasakan sentuhan empati seorang pemimpin atas kondisi riil yang mendera hidup mereka sehari-hari.

Disamping itu begitu banyak kita disuguhkan oleh pemimpin/elit politik perilaku-prilaku yang menyimpang baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi (seperti melakukan perbuatan maksiat, perselingkuhan, dan perbuatan amoral lainnya) maupun yang berhubungan dengan perilaku dalam politik paraktis seperti melakukan KKN, menghalalkan segala cara dalam memperoleh kekuasaan, dan lain sebagainya.

Mungkin ini tragedi yang paling pahit dirasakan rakyat kecil. Mereka kehilangan figur pemimpin dengan model keteladanan yang tak diragukan. Tak sedikit mereka berkata dengan nada gamang, kita menghadapi zaman besar dengan dipimpin orang-orang kerdil. Dunia semakin tanpa batas. Persaingan bukan lagi antar Negara. Tapi, kota melawan kota, bahkan, individu melawan individu.

Kegagalan elite menampilkan keteladanan sangat berakibat buruk bagi masyarakat. Bukan hanya dalam aspek hilangnya respek. Tapi merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang luas. Akan berkembang sikap individualistik, hedonistik, dan permisif dalam masyarakat. Masing-masing beraktivitas hanya untuk bertahan hidup dirinya saja. Bila mendapatkan kelebihan fasilitas hidup,

dinikmati hanya oleh dirinya dan keluarga terdekatnya saja. Rasa berbagi luntur. Hilangnya rasa berbagi akan berbanding lurus dengan sikap hedonisme. Ingin mereguk kenikmatan sebanyak mungkin, tanpa hirau dengan orang lain. Sementara bagi yang kurang beruntung sikap itu sangat menorehkan luka. Marah. Tekanan hidup tanpa katup pelepasan membuat mereka bak petasan bersumbu pendek. Konflik horizontal mudah meletus, bahkan untuk alasan yang paling sepele. Antar kampung tawuran, antar suku berperang. Konflik pribadi disikapi sebagai konflik komunal. Yang sangat menyedihkan fenomena ini pun terjangkau di kalangan terdidik. Mahasiswa tawuran antar fakultas, antar universitas untuk alasan yang tidak bisa diterima akal waras.

Pada hal dengan persaingan antara bangsa semakin kompetitif. Bangsa besar ini membutuhkan pemimpin yang bisa memenangkan kompetisi itu. Setidaknya kehadirannya di pentas global bisa mengangkat martabat dan kehormatan bangsa di hadapan bangsa lain. Sayangnya, kebanyakan elite kita masih terkurung di dalam kubangan persoalan diri mereka sendiri. Ada yang sibuk mematut-matut citra diri di depan publik. Ada yang tak bisa membedakan antara urusan institusi dengan urusan pribadi, bertengkar dengan orang dekat untuk berebut pengaruh. Ada yang dalam diam-diam menikmati menjadi ratu dengan vested interest orang-orang yang menghasungnya. Ada yang tinggi hasrat berkuasanya setinggi hasratnya dikelilingi aktris-aktris cantik. Ada juga yang merasa dirinya berhasil menjadi seorang pemimpin, tapi mengemis-ngemis dukungan untuk bisa tampil dalam kompetisi seleksi pemimpin.

Sudah saatnya bangsa ini sadar tentang urgensi memimpin dengan keteladanan dan etika politik. Karena perilaku pemimpin adalah standar moral masyarakat yang dipimpinnya. Semakin agung kepribadiannya, semakin tinggi adab rakyatnya. Semakin tinggi rasa empati si pemimpin, setinggi itu juga rasa percaya rakyatnya.

Keteladanan merupakan syarat mutlak dalam pendidikan politik yang merupakan sarana pembentukan budaya politik. Dengan adanya partisipasi politik yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan maka demokrasi mencapai hakekatnya. Semakin publik bersifat apatis/ apolitis maka demokrasi semakin jauh dari yang seharusnya. Di sini, partisipasi politik sangat bersandar kepada kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin politik dan publik itu sendiri. Artinya, publik bukan hanya berpartisipasi berdasarkan ikatan primordial dan emosional tetapi rasionalitas dan kedewasaan. Kompetensi merupakan komponen penting dalam budaya politik yang menanamkan nilai, prinsip, norma serta etika berpolitik. Nah, kompetensi ini datangnya dari pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan secara kontinyu kepada publik. Tidak bisa tidak, akhirnya keteladanan dan etika politik adalah syarat mutlak.

Jika peran yang dilakukan oleh legislator berdasarkan etika politik dan keteladanan, sehingga masyarakat meyerap nilai-nilai dari keteladanan itu, maka inilah yang memberikan pendidikan kewarganegaraan pada masyarakat. Persoalannya sekarang apakah "kiprah" anggota legislatif selama ini telah menunjukkan keteladanan dan etika politik sehingga memberikan pendidikan

kewarganegaraan (civic education) pada masyarakat .

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Masyarakat

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education) mengembangkan tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan watak-watak kewarganegaraan (civic dispositions).

Tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat lokal, maupun nasional. Hasilnya adalah dalam masyarakat demokratis kemungkinan mengadakan perubahan sosial akan selalu ada, jika warga negaranya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya. Partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu memerlukan (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi.

Civic Education memberdayakan warganegara untuk dapat membuat pilihan yang bijak dan penuh dengan kesadaran dari berbagai alternatif yang ditawarkan, memberikan pengalaman-pengalaman dan pemahaman yang dapat memupuk berkembangnya komitmen yang benar terhadap nilai-nilai dan prinsip yang memberdayakan sebuah masyarakat bebas untuk tetap bertahan. Civic Education bukan hanya meningkatkan partisipasi warga negara, tetapi juga menanamkan partisipasi yang berkompeten dan bertanggungjawab dan kompeten harus didasarkan pada perenungan (refleksi), pengetahuan dan tanggung jawab moral.

Ace Suryadi mengatakan bahwa Civic Education menekankan pada empat hal :

Pertama, Civic Education bukan sebagai Indoktrinasi politik, Civic Education sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. Civic Education seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langsung dengan proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembengunan bangsa yang bertanggung jawab. Kedua, Civic Education mengembangkan state of mind, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. Civic education memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (civic intelligence), tanggung jawab (civic responsibility), dan partisipasi (civic participation) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis. Ketiga, Civic Education adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas (watering down) seharusnya diubah

menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. Civic education membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi dilingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat. Keempat, Civic Education sebagai lab demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (teaching democracy), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (doing democracy) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini civic education lebih dipentingkan karena menekankan pada:

Pertama, Civic Education tidak hanya sekedar melayani kebutuhan-kebutuhan warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi, tetapi lebih dari itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal menyangkut cara-cara penyelesaian masalah. dalam konteks ini, civic education juga menjanjikan civic knowledge yang tidak saja menawarkan solusi alternatif, tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (konstruktif). Kedua, Civic education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

PENTINGNYA KETELADANAN ELIT POLITIK BAGI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT

Sejak pembahasan pertama oleh dua filsuf Yunani klasik, Plato dan Aristoteles, mengenai hakikat kegiatan politik memang berkaitan dengan masalah moral. Politik didefinisikan sebagai keperihatinan pada isu-isu umum yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan komunitas. Mereka membedakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan umum dipandang sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aristoteles menyatakan, “Manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik; sudah menjadi pembawaannya hidup dalam suatu polis”. Hanya dalam polis manusia dapat mencapai nilai moralnya yang paling tinggi. Di luar polis, manusia dapat menjadi subhuman(binatang buas) atau superhuman(Tuhan).

Lebih lanjut Aristoteles dan Plato memandang politik terutama dalam kerangka tujuan-tujuan moral yang harus dikejar oleh para pengambil keputusan. Adanya polis untuk mencari kebaikan bersama, kebajikan masyarakat, dan kesempurnaan moral. Para pemimpin politik mempunyai tanggungjawab untuk menjamin kebahagiaan, yang bukan sekadar kenikmatan hedonistik, melainkan kesesuaian gagasan dan tindakannya. Oleh karena itu, perilaku mereka harus dinilai berdasarkan kriteria etis, yaitu apakah mereka hanya memenuhi kepentingan pribadi atau melayani kepentingan

umum.

Oleh karena itu para praktisi politik termasuk pemimpin dan elit politik ,berbuat dan bertindak dalam semua aspek kehidupan termasuk politik harus berdasarkan kriteria moral/etis tersebut. Dan hal inilah yang memberikan keteladanan bagi masyarakat ?

Banyak faktor yang menjadi sebab langkanya pemimpin yang memberikan keteladanan. Pertama, faktor hukum yang lembek. Ketidaktegasan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan elite membentuk sosok elite dengan karakter yang lemah. Kedua, rakyat yang mudah memaafkan pemimpin yang berbuat salah. Akibatnya, mental para pemimpin tidak pernah dewasa. Kepala sudah beruban, tapi kelakuan seperti bocah yang gemar rebutan mainan. Ketiga, budaya gotong royong yang memberi celah seseorang terlepas diri dari tanggung jawab. Pemimpin memanifulasi semangat “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” untuk tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahannya dalam mengambil suatu kebijakan. “Itu kan keputusan bersama. Jadi, semua harus ikut menanggung akibatnya,” dalihnya. Keempat, tipisnya budaya malu dalam melakukan pelanggaran. “Belum ada Putusan Tetap dari Lembaga Peradilan,” ini kalimat sakti para elite untuk tetap tetap menjabat meski tengah diproses secara hukum. Jadi, sangat utopia jika mengimpikan ada budaya mundur di negeri ini. Kelima, lemahnya ingatan publik akan rekam jejak (track record) elite orang per orang. Sehingga, dengan mudah seorang elite busuk muncul lagi di pentas nasional setelah salin rupa dan ngumpet sejenak sampai masyarakat lupa akan kasus yang membelit dirinya. Keenam, tidak ada kontrol efektif masyarakat terhadap elite. Masyarakat cenderung menganggap seorang pemimpin sebagai Ratu Adil sehingga layak diberi cek kosong atas kekuasaannya. Kekuasaan tanpa kontrol itulah yang menumbuhkan sikap “semua ini milikku” dalam diri si pemimpin atas semua kekayaan rakyat yang dikuasakan pengelolaannya kepada dirinya.

Jika kita kaji sebenarnya ada lima alasan kenapa seseorang dijadikan pemimpin oleh masyarakatnya. Pertama, seorang pemimpin diikuti karena posisi formalnya sehingga masyarakat takut untuk menentang setiap kebijakannya. Kedua, pemimpin diikuti karena hubungan yang dekat sehingga masyarakat mengikutinya tanpa pertimbangan yang rasional. Ketiga, pemimpin diikuti karena prestasi yang diraihinya, masyarakat bangga atas capaian kerja yang diraihinya. Keempat, pemimpin diikuti karena membangun kepercayaan diri masyarakat. Kelima, pemimpin diikuti karena menjadi contoh dari cita-cita dan harapan hidup masyarakat.

Namun kata kunci dari kelima hubungan pemimpin dengan yang dipimpin itu adalah rasa percaya (trust). Masyarakat yang dipimpin percaya dengan diri pemimpinnya. Inilah yang kini terasa tergerus. Maka untuk hal ini perlu keteladanan dan etika politik dari anggota legislative. Pola kepemimpinan saat ini semakin formalistik. Sehingga antara seorang pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya terdapat jarak. Sementara resistensi masyarakat juga semakin tinggi.

Keteladanan adalah visualisasi dengan kekuatan imitasi yang jauh lebih besar ketimbang membaca atau mendengar. Tidak heran tayangan smack-down di televisi menghasilkan banyak

korban karena anak-anak dengan kepolosannya meniru “keteladanan-kekerasan” yang disajikan televisi melalui tayangan tersebut. Tayangan demikian telah menuai protes keras dari masyarakat, karena materinya yang demikian berbahaya dan mendatangkan pengaruh buruk bagi pemirsanya.

Selain itu, keteladanan merupakan suatu dukungan kepada perintah yang diberikan sehingga publik lebih mudah menerapkan suatu aturan moral. Tanpa keteladanan, publik akan mengalami konflik antara what ought dan what is. Tetapi dengan adanya keteladanan, hal itu akan menjadi katalisator yang amat besar mendorong kekuatan moral publik untuk mentaati aturan moral yang mereka dengar atau baca. Di sini, keteladanan merupakan suatu keadilan (fairness) sebagai alasan dan dorongan bagi publik untuk menjalankan suatu aturan. Jangan lupa, jika rasa keadilan (fairness) terpenuhi, orang akan sanggup melakukan apa saja karena ia merasa pantas dan patut untuk melakukannya.

Keteladanan merupakan syarat mutlak dalam pendidikan politik yang merupakan sarana pembentukan budaya politik. Budaya politik sendiri adalah sesuatu yang bersifat *sine qua non* bagi partisipasi politik. Dengan adanya partisipasi politik yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan maka demokrasi mencapai hakekatnya. Semakin publik bersifat apatis/ apolitis maka demokrasi semakin jauh dari yang seharusnya. Di sini, partisipasi politik sangat bersandar kepada kompetensi yang dimiliki oleh publik. Artinya, publik bukan hanya berpartisipasi berdasarkan ikatan primordial dan emosional tetapi rasionalitas dan kedewasaan. Kompetensi merupakan komponen penting dalam budaya politik yang menanamkan nilai, prinsip, norma serta etika berpolitik. Nah, kompetensi ini datangnya dari pendidikan politik secara kontinyu kepada publik. Tidak bisa tidak akhirnya, keteladanan adalah syarat mutlak.

Menurut penelitian Psikologi, 83 % perilaku manusia dipengaruhi oleh apa yang dilihat, 11 % oleh apa yang didengar dan 6 % sisanya dipengaruhi oleh campuran berbagai stimulus (Prof. Dr. Achmad Mubarak MA,). Perilaku masyarakat Indonesia, termasuk para pemimpinnya sangat dipengaruhi oleh gempuran budaya global. Dengan teknologi informasi (TI) Globalisasi mengubah dunia menjadi kampung kecil. Apa yang terjadi di suatu negeri pada saat yang sama dapat dilihat oleh seluruh penduduk bumi.

Salah satu penyebab utama tersendat-sendatnya proses reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis adalah kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik akibat proses pembodohan politik yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Orde Baru. Kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah

dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elit politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Pada hal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik

Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Dengan kerangka berpikir yang demikian, maka partai politik yang oleh Antonio Gramsci dikategorikan sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil (Roger Simon, 1999), diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai Instrumen Of Political Education dengan baik dan benar, sesuai amanat yang tertuang dalam pasal 11 huruf a UU UU No. 2 Tahun 2008, tentang partai politik.

PENUTUP

Salah satu penyebab utama tersendat-sendatnya proses reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis adalah kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik. Maka dari itu untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Keteladanan merupakan syarat mutlak dalam pendidikan politik

DAFTAR PUSTAKA

- Abizar.(1991). ” Analisis Ranah / kawasan dan Observasi Terfokus” UNP Padang
- Azra, Azyumardi, Pendidikan Kewargaan Untuk Demokrasi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan (Civic Education) di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei 2001
- Hikam, M.A.S. 1999, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Soekanto, Soejono. (1982) . “ Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat” . Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Suryadi, A. dan Somardi, H. 2000. ‘Pemikiran ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan’, makalah yang disajikan dalam *Seminar on the Needs for New Indonesian Civic Education*, 29 Maret 2000, Center for Indonesian Civic Education.
- Winataputra, U.S. 2000. ‘New Indonesian Civic Education: A Rationale Building (ALook-back at the CICED’s National Survey for New Indonesian Civic Education)’, Center for Indonesian Civic Education.
- Zamroni, Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001